BAB I

PENGENTASAN KEMISKINAN VERSI GBHN RI 1993-1998 (STUDY ANALISA HUKUM ISLAM)

1. Latar Belakang Masalah

Dimasa sekarang, kemiskinan dikenal sebagai tiadanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan pokok ini termasuk salah satu dari hak-hak manusia dalam Islam, bila ia tidak mampu memperolehnya dengan usaha ketrampilan dan penghasilannya karena sesuatu sebab, maka menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya. (Dr. Nabil Subhi Ath-Thawil, 1993 : 36).

Menurut Lappe dan Collinsseperti yang dikutip oleh Nabil Subhi Ath-Thawil setelah menjelajah daerah-daerah kelaparan bahwa kelaparan terjadi justru diber-bagai tempat yang disebut sebagai " *Gudang Pangan*". Demikian juga kata George bahwa penyebab utama kemiskinan adalah ketimpangan sosial dan ekonomi- karena adanya sekelompok kecil orang orang elite hidup mewah diatas penderitaan banyak orang. Pengamatan yang cermat atas situasi yang terjadi sekarang ini menunjukkan bahwa hanya simiskinlah- dimanapun mereka berada yang mende-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rita kelaparan dan bahwa pola ketidak adilan dan pengi-sapan yang berakar dalam baik yang tumbuh didalam maupun yang diimpor dari luar negeri merintangi orang miskin untuk mencukupi kebutuhan pangannya.

Ruddolf H. Strahm, ahli ekonomi Swis seperti yang dikutip oleh Nabil Subhi Ath-Thawil, bahwa :

> "keterbelakangan bukan hanya kemiskinan material, tetapi jurang antara kelas-kelas sosial, pembangun an yang terjadi sekarang kebanyakan hanya pembangun an keterbelakangan/pengembangan kemiskinan (Nabil Subhi Ath-Thawil 1993 : 12)

Usaha mengatasi ketimpangan dalam kehidupan manusia, bermasyarakat itu merupakan tanggung jawab manu sia. Usaha itu menjadi inti dari program kemanusiaan : "membangun kembali dunia", yang harus dilakukan manusia "atas nama Tuhan" dengan penuh rasa tanggung jawab kepadanya, karena sesungguhnyalah manusia ini bertindak di bumi sebagai wali pengganti (khalifah) Tuhan, maka baik dan buruk dunia ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia, dan manusia harus penuh dengan kesungguhan mem perhitungkan tindakan-tindakan yang dipilihnya di hadap an Tuhan (Dr. Nurcholis Madjid, 1993, 158). Demikian juga menurut Sayyid Qutb dalam bukunya "Keadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sosial Dalam Islam, 1984 : 89)

Dengan demikian tidaklah benar apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa orang itu miskin karena bodoh, tidak mau bekerja keras, kurang hasrat berprestasi, tidak memiliki jiwa wira swasta, fatalistis, pasrah kepada nasib, atau barang kali juga karena dosa-dosa yang pernah mereka buat. Kemiskinan bukanlah menjadi masalah individual, Allah menyebutkan penyebab kemiskinan adalah kecenderungan untuk tidak memuliakan anak yatim, tidak adanya usaha bersama untuk membela orang miskin, kecenderungan untuk menggunakan sumber-sumber daya (At-Turats) secara rakus, dan kecintaan yang berlebih-lebihan pada harta benda. Islam memandang kemiskinan sebagai akibat dari sistem sosial yang timpang, dari kekurangan solidaritas sosial, dari sunnah sayyiah dimasyarakat. Allah berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 1-3 :

ويل لكل همزة لمزة ① الذي جمع مالا وعدده ②

يحسب ان ماله اخلده ③ (الهمزة: ١-٣)

"Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip penting yang dapat ditarik berkaitan dengan pengentasan kemiskinan yang Islami adalah sebagai berikut :

a. Kemiskinan dan keterbelakangan adalah tanggung jawab kita bersama (Dr. Nabil Subhi Ath-Thawil, 1993:17).
b. Perpindahan pemihakan umat kepada kelas-kelas yang terancam, sehingga transformasi sosial ke arah pemerataan pendapatan dan kesempatan dapat terjadi (Dr. Kunto Wijoyo, 1991 : 182).
c. Prilaku ekonomi yang menunjang terutama yang mengarah pada terwujudnya keadilan sosial yaitu keadilan berdasarkan persamaan manusia (egalitarianisme).
d. Mengharuskan adanya kerja sama kemanusiaan atas dasar kebaikan dan tanggung jawab kepada Tuhan, dan bukan atas dasar dosa dan rasa permusuhan (Macel A. Boisard, 1980 : 108).

Dari prinsip-prinsip dasar di atas dapat diambil suatu asas penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran dengan cara yang benar. Asas yang dimaksud adalah asas adil dan merata, hal ini dapat dipahami dari maksud yang terkandung dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34-35 :

يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله -
فبشرهم بعذاب أليم ﴿٣٤﴾ يوم يحمى عليها في نار جهنم -
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ﴿٣٥﴾ (التوبة: ٣٤-٣٥)

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan Rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan nya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan medapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahir mereka lambung dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka : Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (Akibat dari apa yang kamu simpan itu). (Depag RI : 9 : 34-35 : 283)

Oleh karena itu berdasarkan kedua ayat diatas, berarti memperhatikan nasib orang-orang miskin adalah kewajiban bersama yang merupakan perintah wajib, maka dalam negara Islam, kemiskinan juga termasuk urusan negara dalam mengatasinya terutama pada kejadian ekonomi dan sosial yang dengan jelas digariskan dalam Al-Qur'an.

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalam realitas politik di Indonesia perhatian pemerintah terha dap taraf kesejahtaraan yang layak dalam upaya meningkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan kemakmuran rakyat secara hukum, Indonesia memberi jaminan secara konstitutif terhadap hak-hak atas taraf kesejahteraan yang layak bagi setiap warga negara (GBHN RI Republik Indonesia 1993 -1998 ; 25). Hak-hak ini juga diatur dalam UUD 1945, khususnya pasal 27 ayat 2 yang berbunyi : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dari pasal itu dapat ditarik pengertian tentang adanya hak-hak warga negara : Setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak. Disebutkan juga dalam pasa 34 UUD 1945 bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" berarti merupakan tanggung jawab bersama khususnya pemerintah dalam menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan yang semuanya itu tidak lepas dari sistem ekonomi yang dicita-citakan dalam UUD 1945 pasal 33 (Kompas 12 Maret 1995 halaman 18, kolom 3).

Oleh karena itu dalam GBHN RI 1993-1998 disebut kan bahwa titik berat pembangunan jangka panjang kedua diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan yang diarahkan untuk tetap tertumpuh kepada trilogi pembangunan dan terwujudnya perekonomian yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adil dan merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, yang harus didukung oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi serta sumber daya manusia yang kualitas dalam upaya untuk lebih meratakan pembangunan serta menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan masih perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui penataan peran ketiga pelaku ekonomi dalam ekonomi nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 dan pelayanan sosial yang diberikan terutama kepada fakir miskin dan kelompok masyarakat yang hidupnya masih terasing dan terpencil sebagaimana dengan podato Presiden Soeharto selaku ketua Gerakan Non Blok (GNB) periode 1992-1995 dalam konferensi tingkat tinggi tentang pembangunan sosial di Bella Center, Copenhangen, Denmark, Sabtu 11 Maret 1995, beliau menekankan kesimpulan bahwa kebijakan pembangunan harus tetap menempatkan perhatian kepada manusia dengan tetap memberi perhatian utama kepada masalah kemiskinan dan meningkatnya pengangguran. Sebab kedua masalah itu bisa menyebabkan instabilitas yang akan membawa pengaruh negatif, seperti longgarnya ikatan sosial, integritas sosial, dan melemahnya nilai-nilai hubungan antar manusia. Di dapat dari pengalaman Indonesia memimpin Gerakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Non Blok selama tiga tahun, diakui, pertumbuhan ekonomi memang sangat penting, tetapi tidak bisa menjadi tujuan utama pembangunan. (Kompas 12 Maret 1995 halaman 2, kolom 7).

Berdasarkan hasil pengamatan sementara di atas dapat diasumsikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang ditempuh Indonesia (taraf kesejahteraan yang layak, keadilan yang merata menjadi tugas negara untuk mewujud kannya) merupakan sistem yang Islami (John L. Esposito, 19 : 89). Dengan demikian dapat diambil dugaan sementara bahwa hak-hak setaraf kesejahteraan yang layak dan keadilan yang merata (penyelesaian tentang kemiskinan dalam GBHN RI 1993-1998 untuk sementara adalah sesuai dengan sistem-sistem tentang upaya pengentasan kemiskin an dalam hukum Islam. Dengan ini akan menjadi benar jika dalam penelitian dapat dibuktikan tidak dapat penyimpangan dalam pelaksanaan (penjabaran) nya di semua peraturan pelaksanaan yang menyangkut pengentasan kemiskinan dalam GBHN RI 1993-1998.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh ketentuan ketentuan sistem pengentasan kemiskinan di Indonesia (GBHN RI 1993-1998) sebagai perwujudan hak-hak dalam hukum Islam, khususnya hak atas taraf kesejahteraan yang layak dan keadilan yang merata, diperlukan penelitian yang mendalam tentang masalah tersebut. Demikian bebera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pa pemikiran yang melatar belakangi untuk diadakan pembahasan dalam bentuk skripsi sebagaimana diatas.

2. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa masalah-masalah pokok yang bisa dipela jari antara lain :

a. Apa program kebijakan yang telah dilaksanakan pemerin tah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia?

b. Apa program kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pada PJP II ?

c. Apa tujuan pemerintah mencanangkan program pengentas an kemiskinan ini ?

d. Mengapa masalah kemiskinan ini sebagai sasaran dalam pembangunan jangka panjang kedua ?

e. Apa faktor-faktor penyebab kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia ?.

f. Bagaimana tolak ukur dan ciri-ciri kemiskinan terse- but?.

g. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk membuat pelaksana an IDT yang benar-benar dapat mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan yang selama ini terja- di di masyarakat ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Bagaimana strategi pembangunan ekonomi yang berkeadilan ?

i. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap program kebijakan pemerintah menanggulangi masalah kemiskinan dan kesejahteraan tersebut ?

3. Pembatasan Masalah

Setelah berhasil mengidentifikasikan masalah tersebut agar ada pedoman untuk memberikan arah pada pembahasan skripsi ini, maka penulis hanya membatasi tiga masalah saja, antara lain :

a. Program kebijakan pemerintah menanggulangi masalah kemiskinan dan kesejangan versi GBHN RI 1993 - 1998, dibidang sosial ekonomi.

b. Tujuan pemerintah mencanangkan program pengentasan kemiskinan.

c. Tinjauan Hukum Islam terhadap program kebijakan Pemerintah menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan versi GBHN RI 1993-1998 di bidang sosial ekonomi tersebut.

4. Perumusan Masalah

Agar lebih prktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bagaimana program kebijakan Pemerintah menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan versi GBHN RI 1993-1998 dibidang sosial ekonomi ?

b. Apa tujuan pemerintah mencanangkan program pengentasan kemiskinan ?

c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap program kebijakan Pemerintah menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan versi GBHN RI 1993-1998 di bidang sosial ekonomi tersebut ?

5. Tujuan

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan studi adalah :

a. Mengetahui apa dan bagaimana program kebijakan pemerintah menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan versi GBHN RI 1993-1998 di bidang sosial ekonomi atau memberikan gambaran yang jelad (diskripsi) tantang program yang tengah ditempuh untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pada PJP II.

b. Untuk mengetahui tujuan pemerintah mencanangkan program pengentasan kemiskinan.

c. Untuk mengetahui bagaimana program yang dicanangkan dalam GBHN RI 1993-1998 di bidang sosial ekonomi tersebut menurut pandangan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Metodologi Penelitian

1. Data yang dihimpun

Secara global, data yang akan dihimpun dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Pengentasan kemiskinan dan menanggulangi kesenjang an dalam Islam :
   - Pengertian pengentasan kemiskinan dalam Islam
   - Tujuan pengentasan kemiskinan dalam Islam
   - Tolak ukur kemiskinan
   - Dasar hukumnya
   - Tingkat kemiskinan
   - Faktor-faktor penyebab kemiskinan dan kesenjang an.
   - Akibat kemiskinan
   - Sistem pengentasan kemiskinan dalam Islam.
   - Aspek pembangunan ekonomi dalam negara Islam.

b. Kebijakan Penanggulangan kemiskinan dan kesenjang an dalam GBHN RI 1993-1998.
   - Pengertian pengentasan kemiskinan di Indoensia versi GBHN RI 1993-1998.
   - Substansi kemiskinan dan kesenjangan di Indone- sia.
   - Program kebijakan Pemerintah mengatasi kemiskin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an dan kesenjangan pada PJP II.

- Faktor-faktor penyebab kemiskinan dan kesenjang an di Indonesia.
- Pembangunan ekonomi diIndonesia
- Peranan pemerintah dan swasta dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

2. Sumber data

Sumber data dari pembahasan ini diambil dari beberapa literatur antara lain :

a. Ath-Thawil, Nabil Subhi (1993), *Kemiskinan dan Keterbelakangan Dinegara-negara Muslim,* Bandung : Mizan.

b. Boisard, A. Marcel (1980) *Humainisme Dalam Islam,* M. Rasjidi, Penerjemah. Jakarta : Bulan Bintang.

c. Departemen Agama (1971) *Al Qur'an dan Terkemahnya,* Jakarta Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an.

d. Esposito, L John (1990), *Islam dan Pembangunan,* Jakarta : Rineka Cipta.

e. Ketetapan-ketetapan MPR Republik Indonesia 1993- Termasuk GBHN Republik Indonesia 1993-1998 (1993) Surabaya : Bina Pustaka Tama.

f. Kuntowijoyo, & A.E. Priyono (Ed) (1991)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paradigma Islam Intepretasi untuk aksi Bandung : Mizan

g. Madjid, Nurcholish (1993) *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan*, Bandung : Mizan.

3. Tehnik Penggalian Data

Sumber pokok yang dijadikan acuan landasan teori diatas menunjukkan bahwa studi ini adalah studi pustaka. Dan akan didukung pula dengan beberapa lite atur yang lainnya sebagai kelengkapan pembahasan didalam masalah yang sama.

4. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari buku-buku literatur diencanakan dimulai secara kualitatif dengan tahap :

a. Pengolahan data dengan cara editing

yaitu pemeriksaan kembali dengan data yang telah terhimpun, kelengkapan data, kejelasan maknanya, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lain nya relevansi dan keseragaman satuan kelompok data yang telah terkumpul.

b. Pengorganisasian data

Yaitu data yang terkumpul dimutasikan dalam bentuk kerangka paparan yang telah direncanakan guna menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan gambaran pengentasan kemiskinan versi GBHN Republik Indone-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sia 1993-1998 yang kemudian dikemukakan tinjauan hukum Islam.

c. Penemuan Hasil

Yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil pengor ganisasian data dnegan menggunakan dalil, kaidah, teori dan sebagainya, sehingga diperoleh kesimpul an tertentu dengan menggunakan metode-metode :

1. Metode Induktif

   Yaitu dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset yakni pengentasan kemiskinan versi GBHN RI 1993 1998, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum, berupa generalisasi.

2. Metode Deduktif

   Yaitu dimulai dengan mengemukakan teori- teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset. Misal nya, antara hukum Islam dan program yang tengah ditempuh pemerintah Indonesia sama-sama mempunyai aturan-aturan hukum tentang penyele- saian masalah sosial khususnya pengentasan kemiskinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id